

## Analisis Efektivitas Prosedur Dan Pelaksanaan Penerbitan Lisensi Personel Navigasi Penerbangan Pada Direktorat Navigasi Penerbangan

Suprihatin<sup>1</sup>, Dodi Rahmat Setiawan<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [atinsragen@gmail.com](mailto:atinsragen@gmail.com)<sup>1</sup>, [dodi.rs2303@gmail.com](mailto:dodi.rs2303@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

---

#### Keywords

Effectiveness, Procedures,  
Licenses

*This study aims to determine and analyze conditions, obstacles, and solutions in an effort to increase the effectiveness of the Procedure and Implementation of the Issuance of Aviation Navigation Personnel Licenses at the Directorate of Aviation Navigation. The concept used in this research is effectiveness. This research was conducted at the Directorate General of State Transportation from February 2021 to June 2021. The informants in this study were 7 people. The result of this research is that the effectiveness of the organization has been well appointed by the examiners, where the characteristic variables, environmental characteristics, employee characteristics, and management practice policies have been running well. The obstacles that exist in the company such as: a) the lack of personnel of examiners; b) uneven improvement of supporting facilities; c) requirements are not met. Efforts are made to overcome the obstacles that can be done: increasing the number of members for equal distribution of tasks; equitable distribution of facilities for supporting activities; take online certification to meet the required requirements.*

---

## PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan, mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta mempererat hubungan antar bangsa. Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air. Tidak hanya itu, transportasi juga bisa menunjang mobilitas masyarakat maupun kegiatan ekspor-impor barang antar negara.

Sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat lokal, maka peran transportasi udara sangat penting. Mekanisme penyelenggaraan transportasi di sektor penerbangan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan masyarakat.

Selain itu, negara maupun setiap instansi penerbangan juga harus menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang. Penerbangan juga merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal. Oleh karena itu perlu dikembangkan potensi dan peranannya yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang dinamis. Salah satu

faktor yang mempengaruhi dalam mewujudkan sistem transportasi udara nasional yang handal dan terpadu adalah bentuk pelayanan yang baik. Sehingga pihak pengelola harus menyediakan sarana prasarana yang unggul dan memumpuni di mana mampu menjamin keselamatan aktivitas penerbangan dari berbagai aspek. Proses pengujian Lisensi Personel Navigasi Penerbangan dilakukan oleh Administrator dan Examiner Personel Navigasi Penerbangan yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Menyadari bahwa semakin banyak lulusan dan Personel Navigasi Penerbangan, maka hal ini harus diiringi oleh pemenuhan regulasi dasar untuk penggunaan lisensi sebagai tanda bukti yang sah bahwa seseorang telah melalui pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan dalam bidang tertentu di penerbangan. Persyaratan administrasi penerbitan lisensi sendiri juga diatur dalam PM. 14 tahun 2019 yaitu:

1. Formulir permohonan;
2. Pasfoto terbaru 2 lembar dengan ukuran 2 x 3 berlatar belakang merah;
3. Salinan Kartu Tanda Penduduk (WNI), paspor (WNA);
4. Salinan sertifikat kesehatan kelas 3 bagi pemohon lisensi bidang ATC, atau surat keterangan sehat bagi pemohon lisensi bidang, ACO, TEKNIK, PANS- OPS, PIA & AGGGR/ARO yang masih berlaku;
5. Salinan sertifikat bahasa inggris ICAO Language Proficiency (IELP) paling rendah Level 4 bagi pemohon lisensi bidang ATC dan ACO, TOEIC dengan nilai paling rendah 405 (1+ intermediate) bagi pemohon lisensi bidang TEKNIK, PANS-OPS, PIA & AGGGR/ARO yang masih berlaku;
6. Bukti pembayaran PNBPN sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Dari permasalahan di atas, dapat terlihat bahwa prosedur dan persiapan pengujian sampai pada penerbitan lisensi Personel Navigasi Penerbangan sangat minim dan tidak matang, setidaknya masih belum ada evaluasi yang dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi dari proses yang dilakukan. Sehingga permasalahan ini membuat seluruh proses penerbitan lisensi membutuhkan waktu yang lama. Hal ini akan menghambat pembentukan Sumber Daya Manusia yang kompeten.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengemukakan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Efektivitas Prosedur Dan Pelaksanaan Penerbitan Lisensi Personel Navigasi Penerbangan Pada Direktorat Navigasi Penerbangan**”.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Presthus dalam Sahya Anggara (2012: 151) “administrasi publik didefinisikan sebagai implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik (public administration involves the implementation of public policy which has been determined by representative political bodies).Unsur-unsur pajak”
2. **Manajemen Sumber Daya Manusia** : Menurut R. Wayne Mondy dan Joseph J. Martocchio (2016: 25) “Human resource management (HRM) is the use of individuals to achieve organizational objectives. Basically, all managers get things done through the efforts of others. Consequently, managers at every level must concern themselves with HRM.”
3. **Efektivitas** : Menurut Siagian (2014:151) menyatakan bahwa “efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang ditentukan, artinya apabila pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak adalah sangat tergantung pada bilamana tugas tersebut diselesaikan dan bukan

terutama menjawab tentang bagaimana melaksanakannya serta berapa biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut.”

## **Kerangka Pemikiran**

Seluruh karyawan/pegawai Personel Navigasi Penerbangan diwajibkan untuk mengikuti suatu ujian sebagai tahapan dalam memenuhi kompetensi mereka, atau yang biasa disebut sebagai lisensi khusus. Sehingga negara harus membentuk atau membangun suatu sistem yang mampu menyediakan segala fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pengujian sampai pada penerbitan lisensi tersebut agar dapat berjalan secara efektif.

Sehingga untuk menunjang untuk ditemukannya analisis terkait efektivitas dan prosedur pelaksanaan penerbitan lisensi Personel Navigasi Penerbangan, maka peneliti memilih konsep efektivitas yang dituliskan oleh Sutrisno (2015: 125). Sutrisno mengatakan bahwa terdapat empat faktor efektivitas dalam organisasi, yakni karakteristik organisasi, lingkungan, karyawan, dan kebijakan praktik manajemen.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Nazir dalam Mulyadi (2014:97) desain penelitian dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Dalam melihat efektivitas prosedur pengujian dan penerbitan lisensi personel navigasi penerbangan pada Direktorat Navigasi Penerbangan, peneliti menggunakan konsep efektivitas organisasi yang terdiri dari 4 kelompok variable, yaitu:1) Karakteristik Organisasi; 2) Karakteristik Lingkungan; 3) Karakteristik Karyawan; dan 4) Kebijakan Praktik Manajemen. Konsep tersebut digunakan bertujuan untuk melihat seberapa tinggi pengaruh variable-variabel tersebut pada efektivitas organisasi.

### **Pembahasan**

#### **1. Pembahasan Efektivitas Organisasi pada Prosedur dan Penerbitan Lisensi Personel Navigasi Penerbangan pada Direktorat Navigasi Penerbangan**

##### **1) Karakteristik Organisasi**

Berdasar pada variable-variabel yang mempengaruhi efektivitas organisasi di mulai dari karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi yang dimaksud oleh Sutrisno (2015:125) adalah struktur keanggotaan organisasi dan teknologi yang digunakan. Peneliti menanyakan bagaimana struktur keanggotaan ini dibentuk atau ditetapkan, dan bagaimana dengan realisasi penggunaan teknologi. Untuk melihat hal tersebut peneliti melakukan wawancara, berikut kutipannya:“Sudah baik, sesuai dengan peraturan. Ada Examiner, Administrator, yang melaksanakan tugas dan kewenangan yang sesuai..” - D,2021.“Anggota dipilih dan ditetapkan oleh kepala unit PIA Wilayah” -AA, 2021.

Berdasar kutipan diatas diketahui bahwa struktur keanggotaan penguji dipilih dan ditetapkan oleh kepala unit PIA wilayah. Hal tersebut dinilai efektif karena kepala unit sangat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh unitnya sehingga pemilihan anggota akan lebih ketat dan detail serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggota yang dipilih terbagi menjadi beberapa bagian yaitu, Examiner dan Administrator. Bagian-bagian itu melaksanakan tugas dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan yang ada, seperti pembekalan materi, pengujian dan penetapan lisensi.

Karakteristik organisasi lainnya yaitu teknologi yang sudah diterapkan oleh organisasi, dalam wawancara peneliti menemukan bahwa teknologi yang digunakan ialah PC atau Laptop, serta aplikasi untuk pengerjaan ujian. Ujian dilakukan masih dengan tatap muka atau datang ke lokasi ujian, ujian tidak dilakukan secara online di rumah masing-masing karena gangguan pada jaringan dan terdapat celah untuk kecurangan. Kemudian PC atau Laptop yang digunakan belum banyak di upgrade atau diperbaharui secara fisik maupun sistem, tetapi alat penunjang ini tetap dirawat dan di check secara berkala sehingga kerusakan yang terjadi akan segera diatasi.

## 2) Karakteristik Lingkungan

Variabel selanjutnya yaitu karakteristik lingkungan, dimana kondisi lingkungan kerja, beban kerja, hambatan dan Kerjasama terhadap internal maupun eksternal akan menjadi acuan pada efektivitas organisasi. Berikut kutipan wawancara: “Sudah baik, sebelum dilaksanakan kegiatan sudah diinfo agar tempat kegiatan jauh dari kebisingan.” - D,2021. “Lingkungan kerja sangat baik dan nyaman” -LAK,2021 Lingkungan kerja saat proses pengujian dilakukan terlihat sudah sangat baik dimana penguji sudah memberitahukan kepada pemohon bahwa tempat ujian jauh dari kebisingan sehingga daya konsentrasi dan kenyamanan akan meningkat dan membuat para peserta ujian tenang dalam mengerjakan ujian. Selain itu karyawan juga menyatakan bahwa lingkungan kerja sudah baik dan nyaman, sehingga bekerja terasa menyenangkan. Untuk beban kerja tidak ada perubahan beban kerja selama pandemic berlangsung. “Tidak ada yang berubah tetap sama sebelum dan di masa pandemi ini.” - MA,2021. Karakteristik lingkungan lainnya yaitu Kerjasama dengan pihak eksternal atau Lembaga lain. Hal ini disetujui oleh Inspektur Navigasi Penerbangan bahwa adanya Kerjasama dengan Lembaga lain untuk pengujian dan penetapan lisensi navigasi penerbangan. “Jika dalam hal ini pemohon adalah sebuah institusi/lembaga maka perlu koordinasi sebelum dilaksanakan pengujian, terkait lokasi, tanggal dan jumlah peserta” -D,2021.

## 3) Karakteristik Karyawan

Variabel berikutnya yaitu karakteristik karyawan dimana akan dilihat dari keterikatan karyawan pada organisasi dan prestasi kerja karyawan. Kedisiplinan karyawan dan persyaratan kompetensi untuk menjadi anggota penguji juga dilihat pada bagian ini. Berikut kutipan wawancara: “Sesuai peraturan terkait: Examiner harus memiliki kompetensi/lisensi sesuai yang akan diujikan dan Administrator harus memiliki kompetensi dalam bidang administrasi dan juga bisa mengoperasikan komputer” - D, 2021 “Usia minimal 25 tahun; pengalaman minimal 3 tahun; memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; memiliki lisensi dan rating yang masih berlaku; memiliki sertifikat toeic minimal 405; sertifikat kesehatan; dan memiliki sertifikat pelatihan checker, ojt, sms dan human faktor” -HE, 2021. Berdasar pada kutipan diatas adalah persyaratan serta bagian dalam keanggotaan penguji. Sesuai peraturan terkait bagian dalam tim penguji adalah examiner dan administrator. Examiner bertanggung jawab pada soal-soal ujian serta materi pembekalan yang akan diujikan. Sedangkan administrator

bertanggung jawab dalam pengurusan administrasi seperti perizinan dan penetapan lisensi bagi yang lulus ujian, dan administrator harus mampu untuk mengoperasikan komputer sebagai kompetensi penunjang. Persyaratan lainnya adalah usia anggota penguji minimal 25 tahun dengan pengalaman lebih dari 3 tahun. Anggota juga diwajibkan memiliki sertifikat pelatihan checker, ojt, sms dan human factor; memiliki lisensi dan rating yang masih berlaku; memiliki sertifikat toeic minimal 405; dan sertifikat kesehatan.

## **2. Hambatan Efektivitas Organisasi pada Prosedur dan Penerbitan Lisensi Personel Navigasi Penerbangan pada Direktorat Navigasi Penerbangan**

Setiap pekerjaan tidak lepas dari berbagai hambatan, tidak bisa dipungkiri hambatan menjadi salah satu pengaruh karyawan tidak menunjukkan mencapai efektivitas. Peneliti menemukan beberapa hambatan yang dialami oleh karyawan dalam mencapai efektivitas organisasi.

### **1) Kurangnya Anggota Penguji**

Hambatan pertama yang peneliti temukan adalah sedikitnya anggota penguji dan tim. Kurangnya karyawan membuat anggota lain bekerja rangkap tugas atau double burden, hal ini dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut: “Lumayan berat, karena keterbatasan personel. Sehingga terkadang personel yang bertugas merangkap tugas.” - RD,2021. Karyawan yang terbatas tidak sesuai dengan banyaknya tugas sehingga karyawan harus merangkap tugas tersebut. Banyak karyawan yang merangkap tugas dengan tim lain yang mana diluar dari keanggotaan pengujian sehingga fokus karyawan bisa terpecah. Hal ini bisa membuat karyawan tidak maksimal dengan pekerjaannya sehingga karyawan jenuh dan pekerjaan menjadi tidak efektif. Dengan proporsi karyawan dan tugas yang sesuai akan terjadi maksimalitas dalam pekerjaan sehingga hasilnya pun memuaskan.

### **2) Upgrade Fasilitas Penunjang**

Hambatan lainnya muncul dari faktor teknologi, informan mengungkapkan bahwa fasilitas penunjang kegiatan masih kurang kondisinya, seperti kutipan berikut: “Kurang, belum banyak yang diupgrade”-LAK,2021 “Ada yang sudah di upgrade tapi ada yang belum” -MA,2021. Fasilitas penunjang kegiatan pengujian dan penetapan lisensi ialah komputer/PC/Laptop dan aplikasi online untuk soal-soal pengujian. Berdasar pada kutipan diatas bahwa fasilitas penunjang masih banyak yang belum di upgrade. Secara fisik masih PC lama walaupun begitu kondisi PC selalu di cek berkala dan masih berfungsi dengan baik. Secara sistem banyak PC yang belum di upgrade ke sistem terbaru sehingga terkadang terjadi gangguan seperti lagging sehingga menghambat kegiatan.

### **3) Tidak Terpenuhi Persyaratan Keanggotaan**

Hambatan lainnya yang peneliti dapatkan adalah persyaratan anggota penguji yang masih belum dipenuhi. Terdapat persyaratan seperti sertifikat pelatihan, checker, ojt, sms dan human factor.

## **3. Upaya dalam Mengatasi Hambatan pada Prosedur dan Penerbitan Lisensi Personel Navigasi Penerbangan pada Direktorat Navigasi Penerbangan**

Hambatan-hambatan menjadi bumbu dalam setiap pekerjaan yang ada. Hambatan yang dilalui oleh karyawan bisa berdampak pada efektivitas organisasi. Sebelumnya peneliti membahas salah satu hambatan yaitu kurangnya jumlah personel anggota penguji. Kurangnya jumlah personel anggota penguji bisa berdampak pada kinerja yang tidak efektif dan tidak

sesuai harapan atau visi. Maka dari itu peneliti memberikan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

1) Memperbanyak Personel Anggota Penguji

Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan peneliti mengupayakan sebaiknya personel anggota penguji diperbanyak, sehingga beban kerja tidak merangkap. Sebelumnya pada paparan diatas bahwa anggota penguji merangkap tugas dengan satuan kerja lainnya diluar pengujian dan penetapan lisensi navigasi penerbangan. Tugas yang merangkap akan memecah fokus apabila terdapat tenggat tugas yang bersamaan, sehingga anggota harus mengorbankan tugas lainnya dimana hal itu bisa menjadi tidak profesional. Tidak menjalankan tugas menjadi salah satu tidak terikatnya organisasi dengan efektivitas, maka perbanyak personel anggota penguji menjadi salah satu upaya mengatasi hambatan. Personel yang cukup untuk banyaknya tugas akan memaksimalkan pekerjaannya dalam bidang tersebut, sehingga efektivitas organisasi tercapai.

2) Upgrading Fasilitas Penunjang

Upaya hambatan berikutnya dari faktor teknologi, peneliti melihat bahwa masih kurangnya upgrade pada fasilitas penunjang seperti PC/Komputer, Laptop, jaringan internet dan aplikasi untuk soal-soal pengujian menjadi hambatan dalam kegiatan. Upgrade secara sistem akan membantu dalam kelancaran kegiatan dan untuk meminimalisir lagging saat pengujian. Pengupayaan untuk pengujian online juga sangat dibutuhkan ketika masa pandemic seperti saat ini. Sampai sekarang pembekalan materi dan pengujian masih dilakukan secara tatap muka dimana hal ini beresiko pada penularan Covid-19. Sebaiknya upaya pembekalan materi dan pengujian dilakukan secara online sehingga meminimalisir penularan Covid-19.

3) Mengikuti Sertifikasi Online

Upaya selanjutnya dari hambatan tidak terpenuhinya persyaratan anggota penguji, dimana masih banyak anggota yang tidak memenuhi persyaratan sertifikat. Hal ini dapat diupayakan dengan mengikuti serfitikasi yang diselenggarakan secara online sehingga persyaratan bisa terpenuhi.



## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan pajak daerah pada masa pandemi COVID-19. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Pajak Hiburan di Kota Bekasi sudah berjalan dengan cukup baik. Dikarenakan Bapenda Kota Bekasi memberikan keringanan dalam administrasi pembayaran perpajakan pada wajib pajak sesuai dengan peraturan yang ada pada kebijakan Bapenda Kota Bekasi.
2. Hambatan utama Kantor Bapenda Kota Bekasi ialah adanya pembatasan kegiatan hiburan serta penutupan tempat wisata atau hiburan, kurangnya antusias masyarakat yang belum optimal dikarenakan masyarakat masih ragu akan keamanan protokol kesehatan dan juga adanya pembatasan sosial berskala besar yang menurunkan jumlah pendapatan dan pemasukan pelaku usaha. Hal tersebut berdampak pada penurunan pendapatan pada pelaku usaha hiburan yang mengakibatkan realisasi penerimaan pajak hiburan tidak mencapai target. Serta hambatan utama Wajib Pajak adalah adanya kapasitas dalam menonton, masyarakat lebih banyak menonton melalui streaming online, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang ada didalam tempat wisata atau hiburan serta banyaknya usaha hiburan yang bangkrut akibat adanya lockdown dan pembatasan jam malam.
3. Upaya BAPENDA dalam mengatasi Hambatan dalam penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bekasi adalah dapat mengajukan pengangsuran pembayaran pajak hiburan sesuai dengan undang-undang perpajakan, sosialisasi dan penyuluhan tentang keringanan pembayaran pajak serta Diberikan kebijakan baru dengan mengizinkan tempat hiburan dibuka dengan kapasitas pengunjung yang dibatasi serta dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sehingga dapat meringankan para pelaku usaha hiburan. Serta upaya Wajib Pajak dalam mengatasi Hambatan dalam penerimaan Pajak Hiburan adalah Wajib Pajak dapat melaksanakan kegiatan dengan jadwal operasional dan juga kapasitas pengunjung yang dibatasi, melakukan promosi mengenai tempat wisata atau hiburan sudah aman dan sesuai dengan protokol kesehatan yang sangat ketat serta diberlakukannya jam malam kembali sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Pustaka setia. Dessler, Gary. 2011. Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Hartatik, Indah Puji. 2014. Buku Pintar Membuat Standar Operasional Prosedur. Flash Book: Jogjakarta.
- Mondy, R. Wayne dan Martocchio, Joseph J. 2016. Human Resource Management, Fourteenth Edition. Global Edition. Inggris: Pearson Education Limited.
- Mulyadi. 2014. Sistem Akuntansi. Cetakan Keempat. Jakarta : Salemba Empat. Sondang P. Siagian. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan ke tujuh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tanjung, Adrian dan Bambang Subagjo. 2012. Panduan Praktis Menyusun Standard Operasional Prosedur (SOP) Instansi Pemerintah. Yogyakarta: Total Media.
- Wardiah. (2016). Teori Perilaku dan Budaya Organisasi. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Jurnal
- Desriana Natalia Tarigan dan Jessy D. L.
- Warongan, 2016, "Evaluasi Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kota Manado", dalam Jurnal EMBA, No. 4, No. 1, Maret 2016, hal 1542-1150.
- Hany Amalia. 2017, "Pengawasan Angkutan Barang Di Kota Dumai", dalam JOM FISIP Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.
- Irma Erawati, et.al. 2017, " Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa", dalam Jurnal EMBA, No. 4, No. 1, Maret 2016, hal 1542-1150.
- Madhavi Sukhdani, 2016, "Effectiveness Of Grievance Handling Procedure-A Study Of "Bhilai Jaypee Cement Limited"", dalam International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, Vol. 3, Issue 2, page No. 68- 73, March 2016
- M. Amir. HT, 2016, "Efektivitas Tata Kelola Dan Prosedur Pelayanan Perizinan Investasi Yang Efisien, Transparan Dan Terpadu Di Provinsi Jawa Timur", dalam Jurnal Cakrawala Vol. 10 No. 2 Desember 2016 : 125 –142.
- Maya Ariesti Vinastri, et.al. 2019, "Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Pada PT Kerismas Witikco Makmur Factory Bitung", dalam Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 14(1),2019, 181-186.
- Sulam Mujahid, et.al. 2019, "Pengaruh Penerapan Standar Operasional Prosedur terhadap Efektifitas Pelayanan Keuangan di IAIN Sultan Amai Gorontalo", dalam E-Journal Al Buhuts, Volume 15 Nomor 2, Desember 2019.
- Peraturan Menteri Perhubungan Udara



Nomor PM. 14 Tahun 2019 (CASR 69) tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan.

Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 292 ayat (1) poin c.

Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Menimbang poin c